

PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DESA TUMALUNTUNG SATU KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

Sandro I.B. Sumendap¹

Agustinus B Pati²

Trintje Lambey³

Abstrak

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Perilaku Politik Masyarakat Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran di Kabupaten Minahasa Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Pemilihan umum adalah suatu proses dari sistem demokrasi, hal ini juga sangat penting dalam kehidupan bernegara. Dalam pemilihan umum, rakyat berperan penuh untuk memilih siapa wakilnya yang layak menduduki parlemen dan struktur pemerintahan. Sistem politik di Indonesia sendiri telah menggunakan hak rakyat dalam pemilihan presiden dan kepala daerah, dimana telah dilaksanakan sembilan tahun yang lalu. Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan langsung hingga sampai saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan Faktor sosiologis sangat berpengaruh pada pemilihan Kepala daerah tahun 2020 yakni bupati dan juga gubernur khususnya di desa Tumulung Satu, yakni hubungan keluarga yaitu orang tua dan juga saudara bersaudara berperan penting dengan preferensi pilihan politik masyarakat serta factor kedaerahan yang memang telah melekat di mata masyarakat. dalam prakteknya, factor sosiologis berhubungan erat dengan psikologis. Seperti kebanyakan pilihan masyarakat desa tumalung satu ada pada calon Franky Wongkar yang merupakan asal desanya berdekatan dengan Desa Tumulung Satu. Pendekatan Rasional, adalah salah satu pendekatan yang menjadi kunci kemenangan kebanyakan pasangan calon dalam kontestasi pemilihan umum

Kata Kunci : Perilaku Politik, Masyarakat, Pilkada

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

Sekretariat:

*Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

Pendahuluan

Perilaku politik seseorang dalam menyikapi pilkada ini bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan beberapa bentuk dari perilaku politik individu. Ikut serta dan bergabung dalam partai politik juga merupakan bentuk dari perilaku politik. Hal ini dikarenakan bahwa partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara dan menjalankan kebijakan-kebijakan untuk negara.

Perilaku pemilih dalam Pilkada itu juga sangat penting, dikarenakan apabila pelaksanaan pilkada itu berjalan sukses, maka tentu saja perilaku pemilih itu sukses juga. Perilaku politik dan partisipasi politik pemilih merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perilaku politik pemilih merupakan aspek penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu pemilihan umum. Hal yang ingin ditekankan ialah bagaimana perilaku politik dalam pelaksanaan kampanye, keikutsertaan dalam kepartaian dan juga proses *voting* ataupun pemberian suara dalam pemilihan umum baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Dalam pertarungan perebutan suara ini partai politik tak ubahnya seperti memasarkan sebuah produk barang atau jasa kepada target pasarnya.

Pada dasarnya, jika diibaratkan berdagang, target pasar untuk partai politik adalah para pemilih (*voters*), jika kita melakukan klarifikasi pemilih yang menjadi target pasar partai politik, maka akan terdapat 4 (empat) jenis pemilih potensial. Pertama adalah pemilih ideologis (*ideologist voters*), yang kedua adalah pemilih tradisional (*traditional voters*), yang ketiga adalah pemilih rasional (*rational voters*) yang terbagi dalam pemilih intelektual dan non partisan, sedangkan yang keempat adalah pemilih yang masih berubah-ubah (*swing voters*). *Ideologist Voters* dan *Traditional Voters* menguasai sekitar 40% dari *market share*, sedangkan *Rational Voters* dan *Swing Voters* menguasai sekitar 60% dari *market share* (Priosoedarsono, 2005).

Proses *money politics* terjadi hampir disetiap pemilihan kepala daerah dan dilakukan oleh hampir semua pasangan calon. Meskipun secara normatif (sesuai dengan undang-undang aturan Pilkada) sulit di buktikan sebagai bentuk *money politics*. Namun secara konseptual sebenarnya bisa dikategorikan *money politics*. Ini bisa di lihat dari rangkaian kasus dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia yang teridentifikasi ada yang membagikan beras disertai stiker, menjanjikan dana tertentu kalau terpilih dan fasilitas yang menggiurkan. Bahkan, sekolahpun sudah ikut diintervensi. Ada pula dalam bentuk yang sangat halus seperti dalam bentuk uang bensin, uang transport, uang konsumsi, uang lelah, uang pengganti kerja sampai dalam bentuk “uang dukungan” dan “uang mahar”.

Seiring dengan berkembangnya pemilihan umum di Indonesia, tingkat kesadaran penduduk juga ikut berkembang. Banyak faktor yang bisa saja mempengaruhi hal itu. Partisipasi politik masyarakat sendiri bisa saja mempengaruhi apa yang menjadi pilihan politik individu atau masyarakat itu sendiri. Latar belakang pemilih juga mempengaruhi segala pendekatan-pendekatan terhadap pemilih. Namun pendekatan terhadap pemilih tersebut sangat dipengaruhi oleh media, sosialisasi politik dan lain-lain. Penelitian ini berfokus pada pemilih di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan yang penduduknya yang cukup beragam dan prural. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman ke era reformasi, bisa jadi perilaku pemilih sulit dibaca atau sulit ditebak. Maka peneliti melakukan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut perilaku pemilih tersebut.

Masyarakat Tumulung Satu kecamatan Tareran kecenderungan memiliki sikap yang variatif dalam hal menentukan sikap dan perilaku politik selama proses berlangsungnya pemilihan kepala desa. Ada kelompok masyarakat yang terlihat sangat antusias, cukup antusias, dan ada yang biasa saja dalam menyambut datangnya hari pemungutan suara dengan berbagai cara.

Diantara sikap yang nampak yaitu melalui diskusi kecil yang dilakukan secara tidak sengaja pada waktu

Tinjauan Pustaka **Perilaku Politik**

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan antara keujualompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik (Sujijono Sastroatmodjo, 1995:2).

Dalam pelaksanaan pemilu di suatu Negara ataupun dalam pelaksanaan pilkada langsung di suatu daerah, perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada tersebut hal ini jugalah yang membuat digunakannya teori perilaku politik dalam proposal penelitian ini Perilaku politik dapat dibagi dua, yaitu: Sejalan dengan pengertian politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut (Ramlan Surbakti, 1999:15-16).

Perilaku Politik

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan antara keujualompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik (Sujijono Sastroatmodjo, 1995:2).

Dalam pelaksanaan pemilu di suatu Negara ataupun dalam pelaksanaan pilkada langsung di suatu daerah, perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam

pelaksanaan pemilu atau pilkada tersebut hal ini jugalah yang membuat digunakannya teori perilaku politik dalam proposal penelitian ini Perilaku politik dapat dibagi dua, yaitu: Sejalan dengan pengertian politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut (Ramlan Surbakti, 1999:15-16).

Menurut Dennis Kavanagh (dalam mukti sitompul, 2005), Perilaku politik pemilih dapat dianalisis dengan 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Struktural
2. Pendekatan Sosiologi atau Sosial Struktural
3. Pendekatan Ekologis
4. Pendekatan psikologis
5. Pendekatan Rasional

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Focus dalam penelitian ini adalah perilaku politik Masyarakat di Desa Tumuluntung Satu Kabupaten Minahasa Selatan yang dianalisis menggunakan teori dari Dennis Kavanagh (dalam mukti sitompul, 2004), Perilaku politik pemilih dapat dianalisis dengan pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Sosiologi
2. Pendekatan Psikologis
3. Pendekatan Rasional

Adapun beberapa informan yang direncanakan akan diwawancarai oleh peneliti adalah:

- a. Kepala Desa Tumuluntung
- b. Pengurus Parpol
- c. Masyarakat

Mekanisme wawancara dilakukan secara mendalam dan didasarkan pada sebuah panduan wawancara, pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan penyelidikan informal untuk memfasilitasi diskusi-diskusi antara peneliti dengan informan (Marsh & Stoker, 2010:240).

Pembahasan

1. Faktor Sosiologis

1. Faktos Etnis Kedaerahan

Etnisitas merupakan kategori-kategori yang diterapkan pada kelompok atau kumpulan orang yang dibentuk dan membentuk kolektivitas. Jadi, etnisitas lebih mengacu kepada kolektivitas daripada mengacu pada individu. Ikatan ikatan etnis terwujud dalam kumpulan orang, kelengkapan-kelengkapan primordial seperti derajat, martabat, bahasa, adat-istiadat atau kepercayaan. Kelengkapan kelengkapan primordial tersebut dibebankan kepada setiap anggota yang dilahirkan dalam kelompok tersebut dan menjadikannya serupa dengan kelompok-kelompok lain. Dalam suatu etnis, ada karakteristik yang selalu melekat. Karakteristik tersebut adalah tumbuhnya perasaan berada dalam satu komunitas (sense of community) dan “kekitaan” di antara para anggotanya. Karena karakteristik tersebut maka muncullah rasa kekerabatan.

Dalam politik praktis eksistensi faktor-faktor emosional dan sentimen psikologis yang biasanya terkait dengan faktor primordial dan SARA adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikkan dalam setiap kampanye. Seperti yang diungkapkan Abdul Asri Harahap (2005:116), bahwa: “Penggunaan simbol-simbol primordialisme dan isu SARA untuk menarik dukungan dan bukannya melalui program-program yang ditawarkan sangat berkorelasi dengan kualitas pemimpin yang dihasilkan. Banyak indikator yang menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan pada kandidat untuk mendekati masyarakat lebih menonjolkan pendekatan primordialisme. Hal ini tercermin dari ajakan untuk memilih dengan sentimen kesukuan, agama, golongan, dan wilayah tertentu.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, umumnya masyarakat memilih pasangan calon didasarkan pada wilayah, pendidikan, jabatan, pekerjaan, jenis kelamin dan usia. Hal ini seperti diutarakan informan saat diwawancara, J.H. (Laki-laki umur 48tahun) seorang masyarakat Desa Tumuluntung Satu yang mengatakan:

“Saya memilih calon kepala daerah

terutama bupati yang berasal dari daerah sini, ya tentunya saya memilih bapak Frangky Wongkar yang merupakan desa tetangga, saya cukup mengenal beliau yang memang rendah hati dan tidak memilih teman, beliau juga merupakan pelayan yang ada di gereja dan kami sangat menghormati beliau”

Selain itu, ungkapan serupa diungkapkan oleh saudara O.P. (perempuan umur 29tahun) seorang masyarakat Desa Tumuluntung Satu yang mengatakan bahwa;

“pemilihan bupati dan gubernur pada tahun 2020 lalu, saya memilih yang .satu daerah dengan saya yakni pak PDW, karena saya mengenal beliau dari dulu sebelum jadi wakil bupati dan kemudian mencalonkan diri jadi bupati, untuk apa memilih calon dari daerah luar. Kalau ada di daerah sendiri, kan lebih baik agar supaya pembangunan dan juga bantuan tetap lancar”

2. Faktor Psikologis

Pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong memilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, serta dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis. Namun, figur kandidat yang dianggap memiliki kharismatik dan sosok idaman bagi masyarakat dalam penelitian ini lebih mempengaruhi psikologis masyarakat, Mengingat kecenderungan masyarakat menjatuhkannya pilihannya karena adanya konteks ketokohan yang berperan dominan.

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku memilih. Variable-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang.

Oleh karena itu, pilihan seorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik ini

tidak jarang memilih partai yang sama dengan pilihan orang tuanya. Bahkan, kecenderungan menguatnya keyakinan terhadap suatu partai akibat sosialisasi ini merupakan *impact* daripadanya. Untuk kasus terhadap anak-anak menurut jaros dan grant identifikasi kepertaian lebih banyak disebabkan pengimitasian sikap dan perilaku anak keatas sikap dan perilaku orang tuanya.

Karakteristik pribadi seseorang juga turut berpengaruh terhadap partisipasinya dalam sebagai warga Negara. Kepribadian yang terbuka terhadap sosial lebih memungkinkan seseorang menerima informasi politik dalam lingkungannya. Pemilih yang mengedepankan persoalan emosi semata, sifatnya sangat pragmatis dan mendukung nilai-nilai yang diperjuangkan calon yang akan dipilih. Yang penting calon bisa memberikan apa yang dibutuhkannya secara pragmatis. Seperti uang sogokkan untuk memilih, keikutsertaan dalam organisasi yang dibiaya calon, apalagi telah menjadi tim sukses calon tertentu.

Menurut Kepala Desa Tumuluntung Satu, mengenai pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan tahun 2020 yang lalu mengenai perilaku politik masyarakat mengatakan:

Selaku kepala desa kami bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah baik bupati maupun gubernur, dan kami tetap menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilihnya agar partisipasi masyarakat meningkat. Dalam menyelenggarakan pilkada, kami sebagai penyelenggara berusaha semaksimal mungkin mengakomodir kepentingan masyarakat. Salah satu focus kami juga adalah pemilih pemula yang notabeneanya masih baru dan masih gampang dipengaruhi, oleh sebab itu kami untuk mendidik masyarakat bekerjasama dengan pemerintah desa, kecamatan, panwaslu, PPK mengadakan sosialisasi dengan mengundang beberapa anak sekolah dan mahasiswa yang baru akan memilih pada tahun 2020 dengan memberikan pendidikan mengenai politik bagi mereka agar tidak mudah dipengaruhi apalagi dengan politik uang. Selain itu di desa tumaluntung satu

situasi tetap aman dan terkendali karena kebanyakan masyarakat telah memiliki pilihan tersendiri.

3. Pendekatan Rasional

Memilih pimpinan baik eksekutif (presiden) dan legislatif merupakan memilih sosok pemimpin yang mampu menjembatani persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat luas. Memilih pemimpin yang bisa mengentas masalah kemiskinan, mampu menciptakan lapangan kerja, mampu menyelesaikan persoalan infrastruktur, dan macam ragam persoalan lainnya.

Untuk itu perilaku pemilih (voting behavior) dalam pemilihan umum memiliki posisi strategis dalam menentukan pemimpin lima tahun ke depan. Lima menit di bilik kotak suara sangat menentukan nasib ratusan ribu bahkan jutaan rakyat di daerah. Perilaku atau sikap pemilih yang terbiasa dan kerap menggunakan pendekatan atas dasar rasa kedetakan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) perlu dihindari, sehingga penentuan pilihan calon pemimpin harus didasari kajian rasionalitas sesuai visi-misi dan program kerja calon.

Penentuan pemilihan calon pemimpin yang didasari karena primordialisme, kesamaan ideologi, afiliasi partai politik, kesamaan etnisitas, dan pragmatisme politik harus ditiadakan saat berada di kota suara. Sebab dapat dipastikan pola pendekatan demikian hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang akhirnya hanya akan menyusahkan dan menyengsarakan rakyat banyak terutama calon yang ditawarkan adalah calon yang tidak berkualitas yang hanya mengejar popularitas dan kekayaan semata (mediaindonesia.com.pemilukadadan-pendekatan-rasionalitas).

Mengubah pola pendekatan dalam memilih pemimpin dengan mengedepankan aspek rasioanalitas berdasarkan bobot kekuatan visi-misi dan program kerja pasangan calon dapat menghasilkan calon pemimpin yang berkwalitas dan pendekatan ini pula merupakan salah satu cara menjadikan proses demokrasi di Indonesia berwibawa.

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Menurut prespektif Pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih kandidat yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu. Pendekatan ini melihat adanya untung rugi dalam melihat perilaku pemilih. Bagi masyarakat banyak yang perhitungan untung rugi berkaitan dengan partai apa yang akan dipilih dan termasuk memutuskan bagaimana seseorang harus memilih atau tidak memilih. Disini faktor kesadaran pemilih sangat berpengaruh.

Dalam pendekatan ini sering melihat berdasarkan asumsi sederhana, yaitu setiap orang selalu mengutamakan Pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kita harus memahami bagaimana konteks latar belakang historisnya. Sikap dan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya banyak dipengaruhi oleh proses dan sejarah masa lalu. Ini dikarenakan budaya politik di Indonesia masih kental akan sejarah dan kebudayaan masa lampau. Kedua, kondisi geografis dan wilayah. Hal ini sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilu, secara tidak langsung perilaku pemilih banyak ditentukan oleh faktor wilayah. Oleh karena itu kondisi dan faktor geografis/wilayah menjadi pertimbangan penting dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Misalnya saja dalam pengambilan keputusan, peraturan dan kebijakan sampai dalam pemilihan umum. Hal ini menuntut agar si calon pandai-pandai membuat strategi dalam kampanye agar pemilih cenderung memilih si kandidat tersebut. Ketiga adalah pilihan rasional dimana pemilih dalam menentukan pilihannya selalu berdasarkan pertimbangan untung ruginya.

Pilihan rasional salah satunya mengadopsi pemikiran Anthony Downs dalam karya klasiknya, *An Economic Theory of Democracy* (1957). Secara garis besar, pendekatan yang banyak dipengaruhi perspektif ekonomi itu menjelaskan pilihan

politik seseorang sangat ditentukan kondisi ekonomi seseorang ataupun kondisi ekonomi masyarakat secara umum. (mediaindonesia.com).

Pendekatan rasional biasanya banyak ditemui dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah disetiap daerah, dimana masyarakat cenderung lebih bersikap pragmatis dengan menerima pemberian dengan imbalan suara. Tak terkecuali di Desa Tumulung Satu kabupaten Minahasa Selatan.

Dari hasil wawancara dengan Sdr. J.S (laki-laki umur 21 tahun) seorang masyarakat desa Tumulung Satu mengatakan:

Saya waktu pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, ikut memilih karena memang sudah memenuhi syarat, dan dasar saya adalah karena saya merasa sudah pantas sebagai warga negara dan merasa wajib untuk datang ke TPS. Saya juga memilih bukan karena uang atau ada imbalan, tapi lebih ke rasa tanggung jawab terhadap kewajiban warga negara sekaligus adanya dorongan keluarga untuk memilih, maka saya semakin tertarik untuk datang pertama kalinya ke TPS untuk memilih.

Penutup

Kesimpulan

1. Bagi masyarakat Faktor sosiologis sangat berpengaruh pada pemilihan Kepala daerah tahun 2020 yakni bupati dan juga gubernur khususnya di desa Tumulung Satu, yakni hubungan keluarga yaitu orang tua dan juga saudara bersaudara berperan penting dengan preferensi pilihan politik masyarakat serta faktor kedaerahan yang memang telah melekat di mata masyarakat.
2. Faktor psikologis, sangat berhubungan erat dengan sosiologis, dimana pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan terletak pada hubungan suku, agama. Jadi dalam prakteknya, faktor sosiologis berhubungan erat dengan psikologis. Seperti kebanyakan pilihan masyarakat desa Tumulung Satu ada pada calon Frangky Wongkar yang merupakan asal

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

desanya berdekatan dengan Desa Tumuluntung Satu.

3. Pendekatan Rasional, adalah salah satu pendekatan yang menjadi kunci kemenangan kebanyakan pasangan calon dalam kontestasi pemilihan umum. Visi misi, serta figure calon mendominasi preferensi politik bagi masyarakat, tak terkecuali bagi masyarakat. Selain itu factor untung rugi bagi pemilih pun masih ada dalam pemilihan kepala daerah khususnya Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan.

Saran

1. Perlu adanya pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh partai politik, KPU dan juga Bawaslu selaku penyelenggara pemilu dan hal penting untuk diberikan, mengingat kontestasi pemilihan di Indonesia cukup sering dilakukan. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat mengetahui dengan benar memilih pasangan calon yang ditawarkan oleh partai politik.
2. Pengawas Pemilu diharapkan agar tetap konsisten dalam menjaga kualitas demokrasi khususnya pemilihan kepala daerah di desa Tumuluntung Satu, agar praktek politik uang dapat ditekan seminim mungkin agar terciptanya demokrasi yang berdasarkan keadilan tanpa adanya intervensi. Mengingat tahun 2024 juga akan diadakan kembali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan umum tahun 2024.
3. Disarankan untuk partai politik, untuk mendapatkan simpati masyarakat, untuk membuat program yang mengenai di hati masyarakat serta memberikan Pendidikan politik yang baik bagi masyarakat yang sesuai dengan amanat undang-undang. Pendekatan seperti ini dapat menarik simpati masyarakat untuk parpol tersebut

Daftar Pustaka

Affan Gaffar 1992, Kualiatas Pemilu Mementukan Kualitas DPR. UII Press. Yogyakarta

Adi, Rianto, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit.

Anselm. Strauss, Corbin. Juliet. 2003. Dasar Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama.

Bungin, B. 2007. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Campbell, A. et. al. 1960. The American Voter. Suvey Research Centre. University of Michigan. USA: John Wiley and Sons Inc.

Fadillah Putra, Partai Politik dan Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Gaffar, J. M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.

Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marsh, David dan Gerry Stoker. 2010. *Theory and Methods in Political Science*. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.

Prihatmoko, J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang: Pustaka Pelajar.

Purwoko, B. 2005. *Isu-Isu Strategis Pilkada*

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

*Langsung: Ekspresi Kedaulatan
Untuk Mewujudkan Kesejahteraan
Rakyat.* Laboratorium Politik Unsoed:
Jurnal Swara Politika.

ISSN: 2337 - 5736

Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media
Pressindo.

- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Cetakan kesembilan Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Partisipasi Politik. Semarang : IKIP Semarang. Press
- Simon, H.A. (1960). The new science of management decision (1st.). New York,; Harper
- Schumpeter J. (1966): The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. Harvard
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governace Bagian Kedua.* Bandung: Graha Ilmu.
- Sitompul, Mukti. "Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilu Presiden 2004 (Studi Kasus Pada Mahasiswa FISIP USU Angkatan 2003)." *Jurnal Wawasan* 11.1 (2005).
- Sinaga A, 2013. "Perkembangan UKM di hambat Birokrasi Perizinan". Di upload pada November 2013.
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses*